

IMPLEMENTASI PROGRAM JABAT ERAT BAGI UMKM DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

ANDYRWAN

NPP.30.1178

Asdaf Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Prodi Politik Indonesia Terapan

Email. andyrwanirwan@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dewi Safitri, SH., MH

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The Covid-19 pandemic has hampered the progress of MSMEs in increasing the pace of the economy. Therefore, the Investment Service and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Pinrang Regency carried out the Jabat Close Program to make it easier for MSME players to obtain business legality, improve product quality, access to capital and access to marketing so that the pace of the economy returns to stability. **Purpose:** this study aims to describe how the Implementation of the Close Position Program. **Method :** This study uses a qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The theory used is the implementation theory by Merilee S. Grindle (1980). **Results and Findings:** seen from Merilee S. Grindle's theoretical dimensions, namely the Policy Content dimension has problems in program implementation and also the policy context dimension has problems with compliance indicators and the responsiveness of implementers which is still not optimal due to inadequate human resources. Regarding the implementation of the JABAT ERAT program in Pinrang Regency, it has not run optimally so that it has not been able to reach the target. This is what the researchers saw from the dimensions of the policy content on the indicators of program implementation where the program has not been running evenly across all sub-districts in Pinrang district. As for the scope of the handshake program contained in the regent's Regulation in accordance with the legal basis of the JABAT ERAT program, the researchers concluded that there had been forms of facilitation provided to the government, namely facilitation of MSME product registration, facilitation of administrative completeness of MSME products, marketing facilitation and facilitation of capital assistance. However, in the midst of these things, of course, they have not achieved the desired expectations because there are still obstacles and problems in the implementation of this JABAT ERAT program. **Conclusion :** The inhibiting factors in the implementation of the JABAT ERAT program in Pinrang Regency were lack of socialization, lack of network stability in program implementation, lack of quality human resources, lack of ability to use applications optimal.

Keywords: Implementation, Close Position Program, UMKM

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pandemi *covid-19* menyebabkan terhambatnya progres pelaku UMKM dalam meningkatkan laju perekonomian. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Program mengusung Program Jabat Erat untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, peningkatan kualitas produk, akses permodalan dan akses pemasaran sehingga laju perekonomian kembali stabil. **Tujuan :** penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana Implementasi Program Jabat Erat. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu teori Implementasi oleh Merilee S. Grindle (1980). **Hasil dan Temuan :** dilihat dari dimensi teori *Merilee S. Grindle* yaitu dimensi Isi Kebijakan memiliki permasalahan pada pelaksanaan program dan juga dimensi konteks kebijakan yang mempunyai permasalahan pada indikator kepatuhan serta daya tanggap pelaksana yang masih kurang maksimal dikarenakan sumber daya yang manusia yang kurang memadai. Mengenai implementasi program JABAT ERAT di Kabupaten Pinrang belum berjalan dengan maksimal sehingga belum dapat mencapai target. Hal tersebut peneliti lihat dari dimensi isi kebijakan pada indikator pelaksanaan program dimana program tersebut belum berjalan secara merata ke seluruh kecamatan di kabupaten Pinrang. Adapun ruang lingkup program jabat erat yang terdapat dalam Peraturan bupati sesuai dengan dasar hukum program JABAT ERAT ini peneliti menyimpulkan bahwa sudah adanya bentuk fasilitasi yang diberikan kepada pemerintah baik itu fasilitasi pendaftaran produk UMKM, fasilitasi kelengkapan administrasi produk UMKM, fasilitasi pemasaran dan fasilitasi bantuan permodalan. Namun ditengah berjalannya hal-hal tersebut tentu saja belum mencapai harapan yang diinginkan karena masih adanya hambatan serta masalah dalam pelaksanaan program JABAT ERAT ini. Faktor penghambat dalam implementasi program JABAT ERAT di Kabupaten Pinrang yakni kurangnya sosialisasi, Kurang stabilnya jaringan dalam pelaksanaan program, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kemampuan penggunaan aplikasi. **Kesimpulan :** Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Jabat Erat di Kabupaten Pinrang secara umum belum berjalan dengan optimal.

Kata kunci: Implementasi, Program Jabat Erat, UMKM

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dilihat pada aspek ekonomi, Indikator-indikator penentu sebuah negara di kategorikan berkembang yaitu dilihat dari tingkat penghasilan masih rendah atau pendapatan per kapita rendah; sistem perekonomiannya masih bergantung dari luar atau perekonomian yang tradisional; angka pengangguran yang tinggi; kesempatan kerja yang minim. Berdasarkan data dari ceicdata.com pada tahun 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia sebesar USD\$ 1,058,688.94, sementara pada tahun 2021 PDB Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar USD\$ 1,186,092.99.

Sebagai negara yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi dan ekonomi terbesar di Asia tenggara mempunyai beberapa karakteristik yang membuat Indonesia memiliki peluang perkembangan ekonomi yang begitu pesat. Perkembangan ekonomi yang pesat di tentukan oleh bangkitnya usaha-usaha masyarakat baik skala kecil atau besar. UMKM mempunyai peran yang begitu signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara bahkan dianggap sebagai tulang

pungggung sektor perekonomian di saat perusahaan besar tumbang. Hadirnya UMKM juga juga dianggap menjadi solusi dalam membangkitkan perekonomian nasional

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Terlepas dari perkembangannya banyak diantara mereka para pelaku UMKM belum memiliki akses pendanaan untuk modal usaha ke berbagai lembaga pendanaan, baik lembaga perbankan, maupun lembaga non-bank yang mempengaruhi perkembangan usaha bagi pelaku UMKM. Dalam Pasal 1 ayat (10) UU nomor 20 tahun 2008 yang berbunyi pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pernyataan tersebut maka mengembangkan UMKM adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai salah satu penyangga pangan di Sulawesi, Kabupaten Pinrang memiliki potensi kekayaan alam yang cukup banyak untuk dikembangkan. Sektor yang dapat menjadi potensi Kabupaten Pinrang adalah sektor pertanian, dengan luas lahan pertanian sebesar ± 50 Ribu Ha Lahan Irigasi Teknis dari total + 56 Ribu Ha lahan pertanian. Selain itu, Kabupaten Pinrang juga memiliki produksi komoditas undang yang sangat menjanjikan untuk pengembangan ekspor dan impor nasional. Kemudian pada komoditas lainnya seperti kopi, kemiri dan rumput laut Kabupaten Pinrang juga sangat diuntungkan dalam mengembangkan kaum milenial sebagai pelaku UMKM yang ditandai oleh adanya kerjasama internasional dengan negara Turkiye, Thailand dan Cina. Untuk kerjasama pada negara Cina lebih terfokus pada investasi rumput laut dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal + 700 orang. Terlepas dari beberapa potensi tersebut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 33,56 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 33,51 ribu jiwa. Artinya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang hanya sekitar 5 ribu jiwa. Hal tersebut kemudian menjadikan Kabupaten Pinrang harus fokus dalam memperbaiki aspek kemandirian ekonomi lokal, dengan meningkatkan usaha-usaha masyarakat terutama para pelaku UMKM. Di kabupaten pinrang ada banyak pelaku UMKM yang usahanya belum beroperasi dengan baik karena produk UMKM terus berjuang untuk bersaing dengan produk lain karena kurangnya legitimasi bisnis, kualitas produk yang buruk, kurangnya modal usaha, dan hambatan pemasaran.

Oleh karena itu, Bupati Kabupaten Pinrang mempertimbangan hal tersebut dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus meningkatkan kebijaksanaan pembinaan, legalitas usaha, peningkatan kualitas produk yang rendah, pemodal, serta membantu dalam akses pemasaran melalui inovasi Kerja Sama Pembinaan dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan atau disebut Jabat Erat yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang melalui DPMPTSP yang berkolaborasi dengan para stakeholder dalam memberikan fasilitas pembinaan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM.

Dengan permasalahan diatas pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas DPMPTSP mengelurkan sebuah inovasi untuk meningkatkan pelaku dan kualitas UMKM yaitu program Jabat Erat yang meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Kemudahan perizinan kegiatan berusaha
2. Pendampingan peningkatan kualitas produk
3. Fasilitasi akses permodalan usaha bagi UMKM dari lembaga keuangan

4. Akses pemasaran produk yang lebih luas.

Namun dengan adanya program tersebut masyarakat dan pelaku UMKM kabupaten Pinrang belum sepenuhnya dapat mengakses segala fasilitas dari JABAT ERAT tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun hambatan yang menjadi penghambat perkembangan dan peningkatan UMKM di Indonesia berupa: (a) Minimnya modal usaha; (b) Sulitnya akses perizinan; (c) Persaingan akses pemasaran; (d) Kompetensi manajemen yang buruk; (e) Minimnya akses teknologi informasi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi Dan UMKM. Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi Dan UMKM Di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dapat berhasil maupun gagal ketika para pelaksana tidak memahami dari isi kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dinas Koperasi belum menjalankan komunikasi yang cukup baik dalam mensosialisasikan kebijakan tentang koperasi dan UMKM untuk para pelaku koperasi. Kemudian, Sri Handayani, Dkk, dengan judul Implementasi Program One Village One Product (OVOP) dalam Peningkatan Pendapatan UMKM Klaster Keripik Pisang di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu Model implementasi program OVOP yang diterapkan pada klaster keripik pisang di Kota Bandar Lampung adalah dimulai dari seleksi sentra OVOP, seleksi produk OVOP, dan penetapan produk OVOP yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui FKO, bagi UMKM yang telah ditetapkan sebagai produk OVOP akan diberikan pembinaan OVOP dan penghargaan OVOP berupa promosi produk dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, Rivani, Dkk, dengan judul Implementasi Program Digital Marketing Pada Pelaku Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. Hasil Penelitian program ini dapat meningkatkan kemampuan pemasaran digital para pelaku UMKM terutama pada digitalisasi produk dan promosi. Sedangkan, tindak lanjutnya pelaku UMKM dapat terus memperbaiki strategi pemasaran digitalnya serta mendapat fasilitasi akses lanjutan pembinaan kepada Oorange – Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, adapun perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti pada skripsi ini terdapat pada tujuan dan locusnya. Penelitain pertama tujuan penelitian yakni Untuk Komunikasi dalam Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM dengan locus Kabupaten Karawang. Peneliti kedua, Tujuan dari ini penelitian ini adalah (1) menganalisis implementasi program klaster OVOP keripik pisang di Kota Bandar Lampung, (2) untuk menganalisis pengaruh program OVOP terhadap pendapatan usaha klaster UKM keripik pisang di Kota Bandar Lampung, dan (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang pengaruh keuntungan usaha UKM keripik pisang klaster di Kota Bandar Lampung dengan locus Bandar Lampung (Sri Handayani, Dkk). Penelitian ketiga, Tujuannya untuk mendampingi,

mendukung dan membantu pelaku UMKM dampingannya untuk mempraktekkan materi-materi di webinar (Rivani, Dkk) .

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program dan hambatan dalam implementasi Program Jabat Erat bagi UMKM di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan induktif. Purwanto mendefinisikan pendekatan induktif sebagai strategi yang dimulai dengan memberikan serangkaian kejadian luar biasa yang kemudian dapat disimpulkan sebagai fakta, prinsip, atau aturan (Rahmawati, 2011: 75). Analisis penelitian ini menggunakan teori *Merilee S. Grindle* dengan dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi. sumber data penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik *purposive sampling*. Menurut Kusmayadi dan Sugiarto (2000) dalam Putri Diana Dkk (2017:89) *purposive sampling* “yaitu peneliti sebagai instrument penelitian menentukan informan yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang akan diteliti”. Selain dari teknik pemilihan informan menggunakan Teknik *purposive sampling*, penulis juga menggunakan *snowball sampling* dalam menentukan informan. *Snowball Sampling* adalah “teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian semakin membesar” Sugiyono, dalam Angga dan L. Nirawati, (2017:169). Dengan informannya yakni Kepala Dinas DPMPSTP, Kabid Pengaduan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dimana masing masing 1 orang dan pelaku UMKM serta masyarakat masing masing 3 orang. Instrumen penelitian pada penelitian ini yang pertama ialah peneliti sendiri, kemudian merujuk pada tehnik pengambilan data yakni wawancara, observasi langsung, dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 tahap analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, display data kemudian kesimpulan dan verifikasi berdasarkan teori *Milles dan Huberman* dalam A. Rijali (2018:83).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program JABAT ERAT di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

Implementasi program JABAT ERAT di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari *Grindle* yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) faktor keberhasilan implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

3.1.1 Isi Kebijakan (content of policy)

Dalam pelaksanaan implementasi Program di kabupaten Pinrang ingin dilihat apakah implementasi perda ini telah memenuhi enam kategori isi kebijakan yang sesuai dengan teori *Grindle*, berikut ini adalah penjelasan Implementasi Program JABAT ERAT di Kabupaten Pinrang menurut indikator-indikator dari isi kebijakan.

a. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi dalam Perumusan Program JABAT ERAT

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (interest affected) merupakan salah satu faktor penting yang perlu dikaji lebih dalam lagi guna menunjang efektivitas implementasi kebijakan atau program. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi adalah berkaitan dengan berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Grindle (dalam Agustino, 2012) menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi program JABAT ERAT Kabupaten Pinrang ini dapat dilihat dari kegiatan perumusan program JABAT ERAT.

Dengan upaya yang dilakukan DPMPTSP terkait gagasan program JABAT ERAT ini masyarakat yang dulunya bukan pelaku umkm tertarik memulai bisnis di bidang UMKM dan para Pelaku UMKM semakin bersemangat dalam mengembangkan usahanya berkat adanya perhatian dari pemerintah. Kepentingan lainnya yang mempengaruhi Program JABAT ERAT Kabupaten Pinrang adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dengan penerapan sistem dan aplikasi JABAT ERAT, akan menumbuhkan animo masyarakat untuk inisiatif memulai usaha serta pelaku UMKM mengembangkan usahanya, baik dari sisi volume usaha maupun jangkauan pasar.

Dengan begitu, akan banyak tenaga kerja yang terserap, sehingga meningkatkan produktifitas yang pada gilirannya akan menggerakkan ekonomi daerah serta mendeterminasi pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa kepentingan yang mempengaruhi perogram JABAT ERAT merupakan kebangkitan ekonomi daerah di tengah pandemi covid 19 serta peningkatan daya serap tenaga kerja agar mampu mengurangi angka kemiskinan dan juga pengangguran.

b. Manfaat Dari Program JABAT ERAT

Grindle (dalam Agustino, 2012) menyatakan bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan pada proses implementasinya harus memiliki manfaat yang positif bagi pembuat kebijakan, implementor, maupun target kebijakan. Apabila kebijakan yang dikeluarkan tidak memiliki dampak positif atau manfaat yang diberikan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan atau program tersebut tidak berhasil. Dengan adanya program jabat erat para pelaku umkm khususnya di Kabupaten pinrang dapat merasakan:

Gambar 1

Data Manfaat dari DPMPTSP



Sumber: document DPMPTSP

Dari hasil penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa ada manfaat yang diperoleh oleh Pihak pemerintah serta masyarakat dari Implementasi Program ini.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Adanya Program JABAT ERAT

Derajat perubahan yang ingin dicapai merupakan target atau tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam suatu kebijakan. Pada poin ini, Grindle (dalam Agustino, 2012) berusaha melihat derajat perubahan seperti apa yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki derajat perubahan yang diinginkan, atau sebuah target yang ingin dicapai bagi sasaran atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Sesuai dengan pernyataan dari ibu Andi Mirani selaku kepala dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada saat wawancara yang dilakukan pada 15 Januari 2023 pukul 09.00-09.40 WITA menyatakan bahwa:

Perubahan yang diharapkan dari adanya Program JABAT ERAT Di kabupaten Pinrang ini Masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses fasilitas pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM dalam hal;

- Tertib administrasi perizinan usaha,
- Meningkatkan kualitas produk,
- Memperkuat akses permodalan di lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta
- akses market network untuk pemasaran produk Membuka UMKM

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka kesimpulan dari perubahan yang diharapkan oleh para pelaksana program JABAT ERAT ini ialah pelaku UMKM sudah fokus terhadap pengembangan kualitas serta daya saing produk UMKM dari adanya bantuan fasilitas pendampingan dan pembinaan berkelanjutan.

d. Letak Pengambilan Keputusan Dalam Program JABAT ERAT

Mengambil suatu keputusan dari sebuah kebijakan memiliki tugas penting dalam melakukan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, pada bagian ini harus dijelaskan letak pengambilan suatu keputusan dalam sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan.

Wawancara dengan Kabid pengaduan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal bapak Muh Safri pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 09.20-10.00 WITA di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan:

Peraturan Bupati Pinrang no 39 tahun 2020 tentang Kerjasama Pembinaan Dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan adalah hasil dari masalah yang ada kemudian pemerintah Kabupaten Pinrang merespon masalah tersebut dengan mengambil tindakan dengan membuat perbup ini yang agar dapat dilaksanakan dan perbup ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah.

Perbup tentang JABAT ERAT ini diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai bentuk kepedulian kepada Masyarakat khususnya para pelaku umkm, melalui bantuan pembinaan dan pemasaran yang di harapkan dapat meningkatkan kualitas produk sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya. Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam indikator letak pengambilan keputusan dari program JABAT ERAT didasari dengan perbup no 39 tahun 2020 tentang Kerjasama Pembinaan Dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan.

e. Pelaksanaan Program

Pada saat menjalankan sebuah program atau kegiatan yang harus didukung dengan adanya pelaksanaan program yang dilakukan mampu berkompeten dan kapabel demi kesuksesan sebuah program, maka hal ini harus tertata atau terdata dengan baik. Pelaksanaan program selalu melibatkan beberapa aktor agar terciptanya program yang dapat berjalan dengan baik. Program harus dilaksanakan dengan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan mengetahui wewenang atau tugas masing-masing yang ada di dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini menurut Bapak Muh Safri selaku Kabid pengaduan dan pelaksanaan penanaman modal dinas DPMPTSP Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

Program Jabat erat adalah program yang melibatkan beberapa *stake holder* demi mendukung fasilitas program yang akan dijalankan seperti dalam pemodaln DPMPTSP telah menjalin kerjasama dengan beberapa bank untuk bantuan pemodaln, dan juga telah bekerja sama dengan toko-toko modern dalam memasarkan produk UMKM dari JABAT ERAT. Harapan dari bapak safri semoga kedepan para aktor yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik demi kesuksesan dari program ini.

Gambar 2

Data Dampak Pelaksanaan Program



Sumber: Document DPMPTSP

Para pelaku UMKM sendiri merupakan komponen terpenting dan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program JABAT ERAT itu sendiri, namun ada beberapa pelaku UMKM yang ingin ikut bergabung dengan program tersebut mengalami keterbatasan dalam mengakses aplikasi JABAT ERAT karena akses jaringan yang sulit. Setelah saya melakukan wawancara dengan salah satu rakan saya yang bedomisili di kecamatan Marawi yang memiliki usaha dibidang jasa dimana wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 18.30-21.00 WITA yang pada intinya beliau mengatakan bahwa:

Kami para pengusaha di daerah sini belum sepenuhnya percaya dengan adanya program tersebut dimana kami mencegah adanya upaya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pemerintah dengan adanya kebijakan tersebut. Kami menganggap bahwa segala fasilitas tersebut pasti rumit untuk diakses dimana kami disini juga belum paham dengan aturan dan juga SOP pada program tersebut .

Dari keterangan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program JABAT ERAT ini belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari pelaku UMKM secara keseluruhan dan juga belum terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Pinrang.

f. Sumber Daya Yang Digunakan

Pelaksanaan suatu program harus didukung oleh sumber daya yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan lancar. Sumber daya tersebut menjadi kunci utama dalam kesuksesan dari tahapan pengimplementasian dari kebijakan suatu daerah. Pada bagian ini penulis ingin di jelaskan bahwa dalam pengimplementasian program JABAT ERAT

didukung oleh sumber daya yang tepat, memadai atau tidak. Ibu Andi Mirani pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 09.00-09.40 di kantor DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang di wawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa:

Untuk masalah sumber daya yang digunakan saya rasa bisa dibilang cukup karena untuk sumber daya manusia kita telah bekerja sama dengan sumber daya yang ada pada instansi lain seperti, Aparatur Dinas PTMPTSP, Aparatur Dinas Koperasi UMKM, Aparatur Dinas Perindag, Aparatur Dinas Kesehatan, Lembaga Perbankan dan para Pelaku UMKM. Dengan adanya sumber daya dari beberapa stake holder dapat mendukung segala sumber daya yang dibutuhkan.

Dari indikator ini peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan cukup memadai dimana melibatkan beberapa pihak yang sinkron dalam penyelenggaraan program JABAT ERAT ini.

3.1.2 Konteks Kebijakan

Isi kebijakan selalu dianggap sebagai faktor krusial, dikarenakan dampak nyata atau potensinya akan bergantung kepada lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Segala kebijakan juga harus mempertimbangkan lingkungan dan konteks dimana administrative dilaksanakan. Berdasarkan dari teori Grindle, ada tiga macam indikator yang menjadi bagian dari variable atau aspek kebijakan ini, diantaranya adalah:

- a. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan Dan Program Atau Strategi Dari Aktor Yang Terlibat

Pada suatu kebijakan perlu memperhatikan kekuatan, kekuasaan, kepentingan-kepentingan juga program yang digunakan oleh para subjek, bertujuan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun strategi yang telah dilakukan Pemerintah demi keberhasilan Program JABAT ERAT di Kabupaten Pinrang. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas PTMPTSP ibu Andi Mirani pada tanggal 17 Januari 2023 Pukul 10.00-10.20 menyatakan bahwa:

Kami sebagai pelaksana atau implementor Program tentang JABAT ERAT ini berupaya untuk mewujudkan keberhasilan Program ini dengan cara bertanggung jawab mulai dari Perizinan, Pemodalan, Pembinaan hingga Pemasaran.

Hal tersebut juga ditambahkan oleh bapak Muh Safri sebagai kabid Pengaduan Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 08.00-08.50 WITA di kantor DPMPTSP menyatakan Bahwa:

Ada beberapa strategi yang sudah kita rancang untuk kesuksesan program ini yaitu:

1. Mensosialisasikan inovasi ini kpd masyarakat luas khususnya Pelaku UMKM
2. Menjalin sinergitas antar OPD dan seluruh stakeholder (perbankan, toko modern dan pusat perbelanjaan)
3. Selalu upgrade pelayanan sesuai dengan kebutuhan atau kendala dari Pelaku UMKM
4. Dukungan penuh dari pimpinan (Bupati dan pemerintah provinsi) yang merekomendasikan inovasi ini untuk di study tiru oleh kabupaten kota di Sulawesi Selatan

Pak sarif menganggap bahwa dengan strategi tersebut beliau meyakini bahwa program ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang di inginkan. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa kesiapan strategi dalam menjalankan program ini sudah disiapkan melihat adanya kerjasama yang pas dari beberapa opd terkait dan bantuan kerjasama finansial dari perbankan serta dukungan penuh oleh pemerintah Kabupaten Pinrang yaitu Bupati Pinrang.

b. Karakteristik Dari Lembaga Dan Rezim Yang Berkuasa

Dalam pengimplementasian kebijakan yang sudah dibuat, tentunya pada saat pelaksanaannya tidak akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik pemangku kepentingan dalam hal ini konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya masing masing yang terkait dalam menjalankan fungsinya. Jalannya program JABAT ERAT ini dipengaruhi oleh sikap dari pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang bagaimana tata cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, tata kerama dalam berbicara dan berkomunikasi dengan masyarakat agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan disiplin dalam manajemen waktu sehingga tujuan dari program JABAT ERAT mencapai kata berhasil dalam pengimplementasiannya.

Sikap pegawai Dinas PMPTSP kabupaten Pinrang dalam melayani masyarakat dapat dikatakan cukup baik dilihat dari segi kedisiplinan pegawai setiap hari melaksanakan apel pukul 08.00 WITA, kemudian menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab maing-masing. Dari hasil wawancara bersama informan dan observasi langsung di lapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa lingkungan implementasi ini dengan indikator karakteristik lembaga dan penguasa dalam pengimplementasiannya sudah cukup baik dilaksanakan dan diterapkan sehingga tercapainya pelayanan yang maksimal dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Kepatuhan Serta Daya Tanggap Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana kepatuhan dan daya tanggap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana, masyarakat sebagai objek dari program. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan untuk kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dan pelaku cukup baik namun yang menjadi kendala adalah sosialisasi program JABAT ERAT yang belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Pinrang. Menurut hasil wawancara dengan kepala dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang ibu Andi Mirani pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 13.00-13.30 Menyatakan Bahwa:

Kami beserta aparatur DPMPTSP dan juga beberapa OPD yang terlibat sudah menjalankan program ini sesuai dengan tujuan dari Program JABAT ERAT ini. Para pelaku UMKM yang terlibat juga telah mengikuti aturan dan SOP dari Program JABAT ERAT ini. Kami berharap dengan adanya program ini semua pihak yang terlibat mampu bekerja sama dengan baik tanpa menyalahi aturan dan SOP.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program dan sasaran dari program JABAT ERAT sudah cukup baik, meskipun yang menjadi permasalahannya adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang program JABAT ERAT yang belum menyeluruh.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Program JABAT ERAT Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi program JABAT ERAT di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yaitu kurangnya sosialisasi, jaringan Yang Belum Stabil, sumber daya manusia Yang Masih Kurang

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kementerian Koperasi dan UMKM memproyeksikan bahwa hanya sekitar 3,18% pelaku UMKM yang dapat berkembang dengan baik menjadi pengusaha yang mapan. Hal tersebut dikarenakan minimnya modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Data dari Asosiasi FinTech Pendanaan Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa sekitar 48,6 juta unit UMKM di Indonesia belum memiliki jalur akses kredit permodalan yang dapat menopang usahanya sehingga menyebabkan mayoritas UMKM tidak dapat berkembang pesat.

IV. KESIMPULAN

- 1) Implementasi program JABAT ERAT telah terlaksana namun masih mempunyai masalah dalam pelaksanaannya, sehingga dapat peneliti simpulkan dari kedua dimensi teori *Merilee S. Grindle* yaitu dimensi Isi Kebijakan memiliki permasalahan pada pelaksanaan program dan juga dimensi konteks kebijakan yang mempunyai permasalahan pada indikator kepatuhan serta daya tanggap pelaksana yang masih kurang maksimal dikarenakan sumber daya yang manusia yang kurang memadai. mengenai implementasi program JABAT ERAT di Kabupaten Pinrang belum berjalan dengan maksimal sehingga belum dapat mencapai target. Hal tersebut peneliti simpulkan karena dilihat dari dimensi isi kebijakan pada indikator pelaksanaan program dimana program tersebut belum berjalan secara merata ke seluruh kecamatan di kabupaten Pinrang. Adapun ruang lingkup program jabat erat yang terdapat dalam Peraturan bupati sesuai dengan dasar hukum program JABAT ERAT ini peneliti menyimpulkan bahwa sudah adanya bentuk fasilitasi yang diberikan kepada pemerintah baik itu fasilitasi pendaftaran produk UMKM, fasilitasi kelengkapan administrasi produk UMKM, fasilitasi pemasaran dan fasilitasi bantuan permodalan. Namun ditengah berjalannya hal-hal tersebut tentu saja belum mencapai harapan yang diinginkan karena masih adanya hambatan serta masalah dalam pelaksanaan program JABAT ERAT ini.
- 2) Faktor penghambat dalam implementasi program JABAT ERAT di Kabupaten Pinrang yakni kurangnya sosialisasi, kurang stabilnya jaringan dalam pelaksanaan program, dan kualitas sumber daya manusia

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masihawalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi program JABAT ERAT di Kabupaten Pinrang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas DPMPTSP, pelaku UMKM dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Pinrang yang telah berpartisipasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Ahmad Rijali. (2018). *Analisis data kualitatif*. UIN Antasari Banjarmasin.

Kusmayadi dan Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Dalam Bidang Pariwisata*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Angga dan Lia Nirawati. (2017). *Strategi Pemasaran Pada Café Celebrity Di Jalan Leci Mojokerto*. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jbi/article/view/1577>

Sri Handayani, Dkk, Implementasi Program One Village One Product (OVOP) dalam Peningkatan Pendapatan UMKM Klaster Keripik Pisang di Kota Bandar Lampung

Rivani, Dkk, Implementasi Program Digital Marketing Pada Pelaku Umkm Di Masa Pandemi Covid-19

Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Pembinaan dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan